

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Perhelatan Pemilukada dimaknai sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan program desentralisasi dengan menjadikan rakyat sebagai aktor penting dalam menentukan calon Kepala Daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip pemerintahan yang demokratis, di mana kekuasaan itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Penggunaan simbol-simbol adat, ritus-ritus budaya, dan idiom-idiom primordialisme, memberikan warna tersendiri pada Pemilukada di Manggarai.

Keberadaan elit lokal Manggarai pun sering menjadi sorotan apabila akan dilaksanakannya Pemilukada. Mereka adalah figur yang sering memiliki pengaruh dalam kehidupan komunal masyarakat, figur yang dipandang bijak dalam memberikan keputusan, dan figur yang sering dijadikan teladan oleh masyarakat. Keterlibatan elit lokal dengan kehidupan politik di Manggarai, mengharuskan mereka menggunakan ritual-ritual adat untuk menarik dan mengambil pandangan politik dari sebagian masyarakat. Salah satu ritual yang kerap dipakai dalam Pemilukada Manggarai adalah acara Lonto Leok.

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti mengambil kesimpulan berdasarkan indikator-indikator yang telah diuraikan.

6.1.1 Model Lonto Leok Sebagai Arena Kontestasi

Model lonto leok sebagai arena kontestasi dikaji dengan melihat kompleksitas dari setiap acara yang memiliki keterkaitan satu sama lain, dan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam acara lonto leok tersebut. Peneliti mengambil beberapa kesimpulan berikut :

1. Lonto leok dalam menyambut kedatangan para calon legislatif dan calon Bupati sudah melibatkan peran penuh dari masyarakat kampung Nekang
2. Mbaru gendang memegang peranan penting dalam acara lonto leok, yakni sebagai tempat berlangsungnya lonto leok

3. Dalam lonto leok, masyarakat kampung juga percaya akan kehadiran Roh leluhur kampung sebagai *naga beo* yang adalah pelindung kampung. Persetujuan dari *naga beo* yang dimaknai secara adat, merupakan suatu pertanda baik bagi sang calon
4. Adanya kontrak kerja antara calon dengan masyarakat kampung

6.1.2 Hegemoni Elit Lokal

Keterlibatan elit lokal adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menentukan pandangan politiknya. Berkaitan dengan hegemoni elit lokal, peneliti mengambil beberapa kesimpulan berikut :

1. Elit lokal memiliki pengaruh terhadap pandangan politik masyarakat kampung, hanya saja yang dilakukannya tidak secara transparan
2. Mbaru gendang yang secara normatif selalu berada posisi netral, menjadi benar-benar tidak netral ketika adanya perbedaan pandangan politik dari suku-suku di dalam mbaru gendang
3. Para elit lokal kerap kali ditunjuk sebagai tim sukses dari para calon, sehingga bisa saja menciptakan kontrak kerja di antara keduanya
4. Suku-suku dalam mbaru gendang memiliki pandangan politik yang berbeda.

6.1.3 Perspekti atau Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan muara dari maksud kedatangan calon ke kampung, untuk melaksanakan lonto leok dalam arti politis. Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai pengambilan keputusan, peneliti menyimpulkan hal-hal berikut :

1. Hubungan darah atau *wa'u ase kae* merupakan salah satu indikator yang dapat membentuk perilaku pemilih
2. Realisasi program kerja dari calon yang bersangkutan dapat mempengaruhi pamornya pada pemilihan berikutnya
3. Adanya pemihakan dari para elit lokal terhadap pasangan calon tertentu
4. Adanya aspek historis yang berkaitan dengan jasa sang calon terhadap masyarakat kampung

6.2 Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai lonto leok yang digunakan oleh elit lokal sebagai sebuah arena kontestasi politik, peneliti mengajukan beberapa saran berikut :

1. Eksistensi budaya lonto leok harus terus dijaga dan dilestarikan, agar budaya ini tidak pudar termakan zaman

2. Bertolak belakang dari keresahan warga kampung, perlu adanya perbaikan serta perehapan mbaru gendang di beo Nekang pada khususnya, dan di Manggarai Raya pada umumnya
3. Mbaru gendang harus tetap menjaga kenetralannya terhadap semua pasangan calon, demi terwujudnya suatu sistem demokrasi yang baik
4. Elit lokal walaupun dengan jabatannya yang strategis, harus tetap mempertahankan keadilan politik dengan tidak menggiring opini kepada masyarakat untuk memihak terhadap pasangan calon tertentu
5. Masyarakat yang adalah bagian terpenting dari lonto leok, dituntut agar selalu mengikuti acara lonto leok agar budaya ini terus terjaga
6. Perlu adanya realisasi dan program kerja dari pemerintah terhadap visi-misinya kepada masyarakat saat kampanye.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2005. *Masyarakat: Dinamika Kelompok-Kelompok dan Kebudayaan dalam Pembangunan*. Bandar Lampung: Unila Press
- Agustinus, Leo. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Ahmad, Nadir. 2005. *Pemilukada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*. Gresik: Averros Press
- Aidit Alwi, dan Zainal AKSP. 1989. *Elit dan Modernisasi*. Yogyakarta: Liberty
- Alfian. 1980. *Pemilihan Umum dan Prospek Pertumbuhan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Bottomore T. B. 2006. *Elit dan Kelompok Masyarakat*. Jakarta: Akbar Tanjung Institut
- Budiardjo, Miriam. 1983. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Chalik, Abdul. 2017. *Pertarungan Elite Dalam Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Dagur, Anton Bagul. 1997. *Kebudayaan Manggarai Sebagai Salah Satu Khasanah Kebudayaan Nasional*. Surabaya: Ubhara Press.
- Janggur, Petrus. 2010. *Butir-Butir Adat Manggarai*. Ruteng: Yayasan Siri Bongkok.
- Keller, Suzane. 1995. *Penguasa dan Kelompok Elit, Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Mann, Richard. Penerj. Maria Irawati Yulianto,SS. 1999. *Memperjuangkan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: PT. Enka Parihiyangan.
- Moh,Mahmud MD. 1993. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Natsir, Mohammad. 1983. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gahlia Indonesia.
- Nggoro, Adi M. 1996. *Budaya Manggarai Selayang Pandang*. Ende: PT. Nusa Indah.
- SP.Varma. 2001. *Teori Politik Modern*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Toda, Dami N. 1999. *Manggarai Mencari Pencerahan Histografi*. Ende: PT. Nusa Indah.
- Zuhro, Siti. 2009. *Peran Aktor Dalam Demokratisasi*. Yogyakarta: Ombak

Sumber-sumber lain :

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengatur bahwa pelaksanaan pilkada langsung pada hakikatnya tidak hanya bertujuan untuk mengoptimalkan demokrasi di daerah, melainkan perwujudan dari prinsip otonomi daerah seluas-luasnya.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.